

# *Bangga Melayani Bangsa*

# *Pajak Kita Untuk Kita*



**BAPENDA**  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
PAJAK KITA, UNTUK KITA



# LKPJ 2025

**DISUSUN OLEH:**  
Badan Pendapatan Daerah

## KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai perwujudan kewajiban konstitusional dan bentuk akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja, realisasi target pendapatan daerah, serta efektivitas pengelolaan sumber daya selama satu tahun anggaran.

Penyusunan dokumen ini didasarkan pada hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang mencakup optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, serta pengelolaan pendapatan asli daerah lainnya. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas maupun penyusunan laporan ini masih terdapat ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan sangat diharapkan demi penyempurnaan kualitas kinerja dan pelaporan di masa mendatang.

Demikian laporan ini disampaikan, semoga dapat memberikan informasi yang akurat bagi pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Barat yang lebih baik.

Liwa, 11 Februari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Drs. DAMAN NASIR.MP.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19680701 198901 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

## **1.2 . Visi dan Misi Kepala Daerah**

### 1.2.1. Visi

Lampung Barat Hebat Dan Setia Menuju Indonesia Emas 2045

### 1.2.2. Misi

- a). Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas dan berbudaya;
- b). Mewujudkan Ekonomi Tumbuh Secara Inklusif dan Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal;
- c). Mewujudkan Birokrasi yang amanah, menjunjung tinggi hukum dan berkeadaban;
- d). Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan;
- e). Mewujudkan Masyarakat beriman dan bertakwa, harmonis dengan semangat bergotong royong;
- f). Mewujudkan Infrastruktur berkualitas dan menjangkau seluruh pelosok daerah.

## **1.3. Data Umum Daerah**

### **1.3.1. Data Geografis Wilayah**

Kabupaten Lampung Barat memiliki luas wilayah lebih kurang 3.368.14 km<sup>2</sup> setelah terjadi pemekaran Kabupaten Pesisir Barat atau 10,6% dari luas wilayah Provinsi Lampung dan mempunyai garis pantai sepanjang 260 km. Lampung Barat terletak pada koordinat 4°, 47',16"-5°, 56', 42" lintang selatan dan 103°, 35', 08" - 104°, 33', 51" bujur timur.

Adapun batas wilayah Kabupaten Lampung Barat berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kab. Ogan Komering Ulu Selatan (Provinsi Sumatra Selatan)
- Sebelah Selatan : Kab. Pesisir Barat dan Kab. Tanggamus
- Sebelah Barat : Ka. Pesisir Barat
- Sebelah Timur : Kab. Lampung Utara, Kab. Way Kanan, dan Kab. Tanggamus

### 1.3.2 Data ASN

Pada tahun 2025 Badan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 20 orang Aparatur Sipil Negara dengan rincian 15 Orang Pegawai Negeri Sipil serta 5 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dapat diuraikan ke dalam beberapa kriteria sebagai berikut:

a. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Jenis Kelamin

Pegawai Laki-Laki : 12 Orang

Pegawai Perempuan : 8 Orang



Sumber data : Data Kepegawaian Bapenda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

Jika dilihat Menurut Golongan Ruang maka Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah dapat di gambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Pangkat Golongan**

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang
2	Pembina Tingkat I	IV/b	1 orang
3	Pembina	IV/a	2 orang
4	Penata Tingkat I	III/d	8 orang
5	Penata	III/c	2 orang
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	- orang
7	Penata Muda	III/a	1 orang
8	Pengatur Tk. I	II/d	- orang
9	Golongan IX		4 orang
10	Golongan V		1 orang

Sumber data : Data Kepegawaian Bapenda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

Tingkat Pendidikan pada Badan Pendapatan Daerah, dapat di gambarkan sebagai berikut : Sarjana Strata 2 berjumlah 5 orang, sarjana berjumlah 14 orang dan SMA berjumlah 1 orang.

Formasi Jabatan Struktural pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Non Struktural Tahun 2025**

No.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	STATUS PENGISIAN
1	2	3	4
1	Kepala Badan	1 orang	Ada
2	Sekretaris	1 orang	Ada
3	Kepala Bidang	3 orang	
	➤ Kabid. Pelayanan dan Pendataan		Ada
	➤ Kabid. Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Ada
	➤ Kabid. Penetapan dan Penagihan pajak daerah		Ada
4	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1 orang	Ada
5	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	2 orang	Ada
6	Kasubid Pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah	1 orang	Ada
	Kasubid pendataan pendaftaran objek pajak daerah	1 orang	Ada
7	Kasubid Monitoring dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah	1 orang	Ada
8	Kasubid pelayanan dan konsultasi pajak daerah	1 orang	Ada
9	Kasubid penagihan pajak daerah	1 orang	Ada
10	Kasubid penetapan Pajak daerah	1 orang	Ada
11	Analisis Pendapatan Daerah	1 orang	Ada
12	Pranata Komputer Ahli Pertama	1 orang	Ada
13	Penata layanan operasional	3 orang	Ada
14	Pengadministrasian Perkantoran	1 orang	Ada

*Sumber data : Data Kepegawaian Bapenda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025*

### 1.3.3. Realisasi Pendapatan menurut jenis pendapatan

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun Anggaran 2025 merupakan akumulasi dari berbagai sumber pendapatan yang sah. Secara umum, pendapatan daerah diarahkan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pencapaian realisasi pendapatan menurut jenisnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.3**  
**REALISASI PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
**TAHUN 2025**

No	Uraian	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
	• Pajak Daerah	36.278.559.133,00	34.573.564.765,00	104,93
	• Retribusi Daerah	46.547.325.011,00	43.619.475.598,01	106,71
	• Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.296.507.077,37	3.296.507.077,37	100
	• Lain-lain PAD yang sah	14.753.821.746,60	9.274.518.551,57	159,08
<b>2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>			
	• Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	870.856.410.768,00	892.990.891.725,00	97,52
	• Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.821.776.011,00	68.461.701.068,00	61,09
<b>3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>			
	• Pendapatan Hibah	4.037.720.000,00	4.037.720.000,00	100
	• Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	4.121.435.790,00	4.121.435.790,00	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.021.713.555.536,97</b>	<b>1.060.375.814.574,95</b>	<b>96,35</b>

Sumber Data : Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025

**BAB II**  
**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DAERAH**

Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat terlaksana karena adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 3 ( Tiga ) Program dan 12 ( dua belas) kegiatan, dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan pagu anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. Rp6.998.205.996,00** Mengalami perubahan sebesar sebesar **Rp. 5.981.584.800** dengan rincian per program kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025**

	PAGU APBD	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	%
<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>Rp6.998.205.996,00</b>	<b>Rp5.981.584.800,00</b>	<b>Rp 5.682.121.842</b>	<b>94,99</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Rp3.101.788.396,00	Rp3.288.447.800,00	Rp 3.095.741.775	94,13
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp43.326.100,00	Rp58.390.100,00	Rp 58.370.100	99,96
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp16.713.500,00	Rp31.777.500,00	Rp 31.757.500	99,9
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp5.823.800,00	Rp5.823.800,00	Rp 5.823.800	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp3.363.000,00	Rp3.363.000,00	Rp 3.363.000	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp6.224.400,00	Rp6.224.400,00	Rp 6.224.400	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp6.261.400,00	Rp6.261.400,00	Rp 6.261.400	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp1.820.000,00	Rp1.820.000,00	Rp 1.820.000	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp3.120.000,00	Rp3.120.000,00	Rp 3.120.000	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.263.067.846,00	Rp2.550.141.500,00	Rp 2.395.334.916	93,92
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.254.327.846,00	Rp2.541.401.500,00	Rp 2.386.594.916	<b>83</b>

<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	Rp3.450.000,00	Rp3.450.000,00	Rp 3.450.000	100
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</b>	Rp2.815.000,00	Rp2.815.000,00	Rp 2.815.000	100
<b>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</b>	Rp2.475.000,00	Rp2.475.000,00	Rp 2.475.000	100
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Rp6.998.205.996,00	Rp4.402.000,00	Rp 4.402.000	100
<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	Rp4.402.000,00	Rp4.402.000,00	Rp 4.402.000	100
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Rp66.430.000,00	Rp29.485.000,00	Rp 29.410.000	99,7
<b>Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah</b>	Rp3.101.788.396,00	Rp29.485.000,00	Rp 29.410.000	99,7
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Rp43.326.100,00	Rp29.370.000,00	Rp 29.370.000	100
<b>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</b>	Rp18.625.000,00	Rp10.120.000,00	Rp 10.120.000	100
<b>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	Rp15.000.000,00	Rp19.250.000,00	Rp 19.250.000	100
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rp126.738.400,00	Rp183.428.400,00	Rp 179.580.062	97,90
<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	Rp1.575.000,00	Rp1.575.000,00	Rp 1.575.000	100
<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	Rp19.030.600,00	Rp19.030.600,00	Rp 19.030.600	100
<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	Rp7.860.000,00	Rp7.860.000,00	Rp 4.020.000	51,14
<b>Fasilitasi Kunjungan Tamu</b>	Rp11.059.000,00	Rp11.059.000,00	Rp 11.059.000	100
<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	Rp87.213.800,00	Rp143.903.800,00	Rp 143.895.462	99,9
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Rp103.850.000,00	Rp92.100.000,00	Rp 91.900.000	99,7
<b>Pengadaan Mebel</b>	Rp12.000.000,00	Rp0,00		
<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	Rp91.850.000,00	Rp92.100.000,00	Rp 91.900.000	99,7
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp138.001.300,00	Rp118.976.300,00	Rp 109.324.690	91,8
<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	Rp5.750.000,00	Rp4.750.000,00	Rp 4.750.000	100
<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	Rp57.060.000,00	Rp36.185.000,00	Rp 27.008.390	75
<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	Rp75.191.300,00	Rp78.041.300,00	Rp 77.566.300	99,3

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp322.347.750,00	Rp222.154.500,00	Rp 198.050.007	89,1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp261.100.000,00	Rp171.550.000,00	Rp 147.445.507	85,9
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp11.300.000,00	Rp11.300.000,00	Rp 11.300.000	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp49.947.750,00	Rp39.304.500,00	Rp 39.304.500	100
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Rp140.803.000,00</b>	<b>Rp113.043.000,00</b>	<b>Rp 106.869.131</b>	94,5
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp95.042.000,00	Rp68.185.000,00	Rp 62.011.131	90,9
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Rp95.042.000,00	Rp68.185.000,00	Rp 62.011.131	90,9
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp45.761.000,00	Rp44.858.000,00	Rp 44.858.000	100
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Rp45.761.000,00	Rp44.858.000,00	Rp 44.858.000	100
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Rp3.755.614.600,00</b>	<b>Rp2.580.094.000,00</b>	<b>Rp 2.479.510.936</b>	96,1
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp3.755.614.600,00	Rp2.580.094.000,00	Rp 2.479.510.936	96,1
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp418.372.000,00	Rp215.177.000,00	Rp 213.018.690	98,9
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp332.637.000,00	Rp126.728.000,00	Rp 126.227.721	99,6
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp47.028.000,00	Rp57.585.000,00	Rp 55.110.000	95,7
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp562.050.000,00	Rp457.555.000,00	Rp 412.322.000	90,1
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp496.950.000,00	Rp486.205.000,00	Rp 484.905.000	99,7
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp397.371.600,00	Rp343.775.600,00	Rp 341.087.493	99,2
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp236.836.000,00	Rp162.373.400,00	Rp 162.372.900	99,9
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp272.415.000,00	Rp102.280.000,00	Rp 79.488.332	77,7

<b>Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah</b>	Rp117.497.000,00	Rp50.161.000,00	Rp 50.106.063	99,8
<b>Penagihan Pajak Daerah</b>	Rp537.159.000,00	Rp282.887.000,00	Rp 282.855.112	99,9
<b>Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah</b>	Rp56.891.000,00	Rp42.375.000,00	Rp 39.892.000	94,1
<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	Rp280.408.000,00	Rp252.992.000,00	Rp 232.125.625	91,7

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa sub-kegiatan yang realisasinya berada di bawah target yang ditetapkan atau dibawah 90%. Adapun penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab tidak tercapainya realisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN:** Terdapat selisih antara anggaran dan realisasi yang disebabkan oleh pembayaran gaji dan tunjangan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan riil (real cost).
- 2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan:** Efisiensi belanja dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber informasi digital, sehingga kebutuhan pengadaan bahan bacaan fisik menjadi berkurang.
- 3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik:** Tingkat serapan anggaran pada sub-kegiatan ini dipengaruhi oleh kebutuhan riil yang cenderung fluktuatif.
- 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan:** Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan didasarkan pada tingkat kebutuhan aktual. Kondisi sarana dan prasarana yang relatif baik menyebabkan kebutuhan perbaikan besar tidak muncul selama tahun berjalan.
- 5. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah:** Meningkatnya pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat menyebabkan berkurangnya kebutuhan pelayanan secara langsung, sehingga penggunaan anggaran pada kegiatan tersebut menjadi lebih efisien.

**BAB III**  
**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

**3.1. Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan**

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)	(10)	(11)
						K		K				
I	Bidang Pendapatan Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,69	Poin	71	Poin			
				Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	'- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	11	Dok			
					Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	2	Dok	2	Dok			
					- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	Dok	13	Dok			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	11	Dok			

				Perangkat Daerah								
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	1	Dok			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	1	Dok			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	1	Dok			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dok	2	Dok			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	12	Laporan	12	Laporan			

					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1	Laporan			
				<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>20</b>	<b>Orang/Bulan</b>	<b>20</b>	<b>Orang/Bulan</b>			
					<b>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>Laporan</b>			
					<b>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>	<b>2</b>	<b>Laporan</b>	<b>2</b>	<b>Laporan</b>			
					<b>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</b>	<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>Laporan</b>			

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	Orang/Bulan	20	Orang/Bulan		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	2	Laporan		
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dok	1	Dok		
				<b>Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>Laporan</b>		
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	Laporan		

				<b>Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>12</b>	<b>Lap oran</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>			
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Lapo ran	12	Laporan			
				<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</b>	<b>1</b>	<b>Dok ume n</b>	<b>1</b>	<b>Dokume n</b>			
					<b>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>3</b>	<b>Ora ng</b>	<b>3</b>	<b>Orang</b>			
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	dok	1	dok			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	oran g	3	orang			
				<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan</b>	<b>1</b>	<b>Pake t</b>	<b>1</b>	<b>Paket</b>			
					<b>Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan</b>	<b>1</b>	<b>Pake t</b>	<b>1</b>	<b>Paket</b>			



				<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</b>	<b>5</b>	<b>Unit</b>	<b>12</b>	<b>Unit</b>			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	12	Unit			
				<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>12</b>	<b>Lap oran</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>			
					<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</b>	<b>12</b>	<b>Lap oran</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>			
					<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</b>	<b>12</b>	<b>Lap oran</b>	<b>12</b>	<b>Laporan</b>			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Lapo ran	12	Laporan			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Lapo ran	12	Laporan			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Lapo ran	12	Laporan			

				<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>28</b>	<b>Unit</b>	<b>28</b>	<b>Unit</b>			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit	11	Unit			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	Unit	16	Unit			
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	1	Unit	1	Unit			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>- Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>			
				<b>Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>- Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan</b>	<b>1</b>	<b>Dok</b>	<b>100</b>	<b>%</b>			

				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4	Dok	4	Dok			
				Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendahara an Daerah	- Jumlah Dokumen Piutang Kabupaten Lampung Barat	1	Dok	100	%			
				Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1	Dok	1	Dok			
				<b>PROGRAM PENGELOLAA N PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase realisasi PAD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>105</b>	<b>%</b>			
					<b>Persentase realisasi PBB</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>%</b>			
				<b>Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase realisasi PAD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>105</b>	<b>%</b>			
					<b>Persentase realisasi PBB</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>%</b>			

				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4	Dok	4	Dok			
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2	Laporan	2	Laporan			
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50	Unit	50	Unit			
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1	Laporan	1	Laporan	Database objek pajak daerah Belum terupdate	Dilaksanakannya kegiatan Pendataan objek baru serta updating data pajak baru di 15 kecamatan	Sebagai tindak lanjut rekomendasi DPRD sehingga telah dilaksanakan kegiatan pendataan objek serta updating data pajak baru di seluruh 15 kecamatan
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	Laporan	1	Laporan			
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	200	Objek Pajak	200	Objek Pajak			

				Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)								
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2	Dok	2	Dok			
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	16	Dok	16	Dok			
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Layanan					
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10	Dok	10	Dok			
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5	Dok	5	Dok			
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	8	Laporan	8	Laporan			

### 3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Mengingat peran Badan pendapatan Daerah Kabupaten Lampung yang sangat strategis dalam rangka mendukung pembangunan daerah guna memastikan program yang telah direncanakan dapat terwujud sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada Masyarakat. Maka Badan Pendapatan Daerah memiliki berbagai kebijakan strategis dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Kebijakan strategis

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Penerapan sistem pembayaran pajak secara digital serta penerapan alat perekam lajur transaksi	Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/258/KPTS/IV.01/2022 Tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1. Meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak; 2. Memberikan kemudahan layanan pembayaran pajak 3. Meminimalisir kebocoran Pajak Daerah.
2.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	DPA-Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	1. Memperbaiki persepsi Masyarakat tentang Pajak 2. Memberikan informasi yang akurat kepada Masyarakat tentang kebijakan pengelolaan pajak daerah;
3.	Pendataan Objek Pajak Daerah Baru serta Updating data Objek Pajak	DPA-Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	1. Peningkatan jumlah objek pajak; 2. Perbaikan kualitas data wajib pajak Daerah.
4.	Pemberian hadiah lunas PBB terbaik kepada Kecamatan, Kelurahan serta Pekon	Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/ /KPTS/IV.02//2025 tentang Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Penerima Penghargaan Lunas PBB Tahun 2025	1. Memberikan atas keberhasilan pelunasan PBB Pekon/Kelurahan dan Kecamatan; 2. Sebagai motivasi Pekon/Kelurahan dan Kecamatan untuk dalam mencapai Lunas PBB untuk kedepannya.



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Drs. DAMAN NASIR, M.P.  
Pembina Utama Muda/IV.C  
NIP.19680701 198901 1 002

### 3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Badan Pendapatan Daerah telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3 TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024**

<b>NO</b>	<b>REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>	<b>TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN</b>
1.	Diharapkan Kepada Pemerintah Daerah agar melakukan usulan Perubahan Perda Retribusi untuk disesuaikan dengan kondisi faktual saat ini dan menambah objek retribusi sebagai Upaya peningkatan pendapatan daerah	Akan menjadi pertimbangan menjadi usulan Program Legislasi Daerah Tahun 2026	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah
2.	Diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk memperhatikan dan melakukan pendataan ulang seluruh sektor pajak daerah agar database yang tersedia dapat di update sesuai kondisi saat ini Kabupaten Lampung Barat.	Pada tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan kegiatan Pendataan objek baru serta updating data pajak baru di 15 kecamatan	- Dengan adanya kegiatan pendataan tersebut untuk menggali potensi objek pajak baru sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak baru dari berbagai jenis pajak; -Sementara itu, kegiatan updating data pajak diharapkan dapat membuat data lebih berkualitas.
3.	Kepada Pemerintah Daerah agar lebih meningkatkan pemanfaatan aset dan kekayaan daerah untuk dapat digunakan dan meningkatkan retribusi daerah sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah	Akan tetap di optimalkan usaha pemanfaatan aset daerah salah satu Upaya yang dilakukan Adalah penyusunan Perbup tentang Tarif pemanfaatan aset tanah yang disewakan oleh pihak lain.	Maksimalisasi Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

<p>Kepada Pemerintah Daerah Agar Kita Bersama-sama Dapat memanfaatkan Platform Digital untuk berinovasi dalam Upaya pelayanan dan juga promosi berbagai macam kekayaan yang dapat meningkatkan Pendapatan Daerah</p>	<p>Pemerintah Daerah telah memaksimalkan Platform Digital dalam upaya mempermudah Pemberian Layanan Pajak Daerah melalui Penggunaan Aplikasi Pajak Mandiri Sistem Aplikasi Non Tunai (PM SANTUN) sejak Tahun 2022. Selain itu, dalam rangka memberikan kemudahan layanan pembayaran retribusi telah dilakukan peluncuran aplikasi e-retribusi untuk pembayaran retribusi pasar. kemudian untuk memberikan informasi mengenai kekayaan daerah kepada Masyarakat Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah melakukan upaya penyebarluasan informasi melalui optimalisasi media sosial serta seperti menjalin Kerjasama dengan berbagai media masa yang ada.</p>	<p>-Memberikan kemudahan layanan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  -Memberikan Informasi yang akurat mengenai kekayaan daerah kepada masyarakat seperti Tempat Wisata, Bangunan dan Tanah Pemda yang disewakan sehingga diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan Pendapatan Daerah.</p>
<p>Kepada Pemerintah Daerah Agar Kedepannya segala sesuatu yang berkaitan dengan pencatatan Pendapatan dan Belanja Agar Target Capaiannya ditingkatkan dan disesuaikan dengan kondisi faktual dan rasional dalam pelaporannya.</p>	<p>Dalam rangka mempermudah pencatatan pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Pada Tahun 2026 akan melakukan Pembukaan Rekening Khusus Pendapatan Asli Daerah sehingga tidak tercampur dengan Rekening Kas Daerah dan diharapkan dapat mempermudah pencatatan, sehingga rekonsiliasi Pendapatan dapat dilakukan dengan lebih sederhana.</p>	<p>Pencatatan pendapatan dan belanja dapat dilakukan sesuai dengan kondisi faktual dan rasional.</p>



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Drs. DAMAN NASIR, M.P.  
Pembina Utama Muda/IV.C  
NIP.19680701 198901 1 002

**BAB IV**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN**  
**PENUGASAN**

**4.1. Urusan Pemerintah Yang Ditugaskan Tugas Pembantuan**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki urusan Pemerintah yang ditugaskan tugas pembantuan.

**4.2. Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Upaya Penyelesaian**

Tidak terdapat hambatan atau permasalahan diakrenakan Badan Pendapatan Daerah tidak memiliki urusan yang dtugaskan dalam tugas pembantuan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikianlah uraian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 disusun. Laporan ini merupakan representasi dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi utama, khususnya pada sektor peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pencapaian kinerja yang tersaji dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang objektif bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemangku kepentingan lainnya. Seluruh keberhasilan yang telah diraih merupakan hasil sinergi dan komitmen kerja sama antar perangkat daerah, sementara kendala yang dihadapi selama tahun 2025 akan dijadikan dasar untuk perbaikan strategi pemungutan pajak dan retribusi daerah di masa yang akan datang.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, melalui Badan Pendapatan Daerah, terus berkomitmen untuk melakukan inovasi berkelanjutan guna mewujudkan kemandirian fiskal daerah demi pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Barat.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Drs. DAMAN NASIR, M.P.  
Pembina Utama Muda  
NIP.19680701 198901 1 002